

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN DAERAH (SIMDA),
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG**

Listiya Ayuningsih*), M. Cholid Mawardi), Arista Fauzi Kartika Sari***)**

**Listiyaayu@yahoo.com
Universitas Islam Malang**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of SIMDA (Regional Management Information System), human resources and the application of government accounting standards on the quality of financial reports in the Malang Regency. Sanusi (2014) population is the entire collection of elements that show certain characteristics that can be used to make a collection. The set of elements shows the number of , while certain characteristics indicate the characteristics of the group. In practice, a researcher rarely conducts research on the entire set of elements (population). The element is the subject on which the measurement is made. . The population in this study were employees of BKAD (regional financial and asset agency) Malang regency. The results of this study indicate that the effect of simda implementation, human resources and the application of government accounting standards has a positive and significant effect on the quality of the local government's financial reports in Malang Regency.

Keywords : *SIMDA, Human Resources, Application of Accounting Standards.*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia telah banyak yang berdiri selain pemerintah daerah. Organisasi sektor publik di tuntut untuk mengedepankan akuntabilitas. Salah satu bentuk indicator yang dapat menunjukkan akuntabilitas adalah laporan Keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis yaitu Neraca , laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Modal dan Arus kas. Menurut Munawir (2010;5) laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas.

Pemerintah daerah sebagai salah satu *pure-non profit organization* juga tak lepas dari tuntutan akuntabilitas. Beberapa peraturan mengenai standar laporan keuangan daerah sudah di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat pada akhir periode anggaran merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat selaku pemberi tugas atau mandat. Pernyataan yang sama disampaikan pula oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD DIY TA 2015 yang mengatakan bahwa :

“akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu hal yang penting sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat yang merefleksikan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. (*www.bpk.go.id*, 2016).

Menurut Djaja (2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keunagn daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk Kualitas Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dinas daerah sebagai organisasi pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Pegawai penatausaha keuangan pada dinas-dinas di daerah harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode akuntansi. Seseorang belum dapat dikatakan memahami penyusunan laporan keuangan jika belum memahami akuntansi. Pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dibutuhkan untuk dapat mengelola informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas.

Selain sumber daya manusia yang kompeten, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Lebih lanjut Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara Dalam Sambutannya di Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD DIY TA 2015 menyampaikan bahwa :

“berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka tahun 2015 merupakan tahun pertama pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban serta kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Dengan LKPD berbasis akrual ini pemda telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.”(bpk.go.id, 2016).

Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan setiap pegawai bidang keuangan dinas daerah Provinsi DIY. Fenomena yang dijumpai masih ditemukan kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Harus diakui masih ada permasalahan yang terjadi dimana staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masih kurang memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil judul” *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi manajemen daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang.*”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya maka terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penerapan implementasi SIMDA, kualitas SDM , dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten malang?
2. Apakah pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten malang ?
3. Apakah pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten malang ?
4. Apakah pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAK) terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten malang ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang Akuntansi.
2. Manfaat Praktis
Dan dapat di jadikan sebagai sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah di pelajari serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN TEORI

Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Menurut Djaja (2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keunagn daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan

mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia secara umum merupakan daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power). Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Adapun pengertian sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2009:27) adalah “tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan”. Pengertian lain dikemukakan oleh Ndraha (2012:7) adalah sebagai berikut : “Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional”

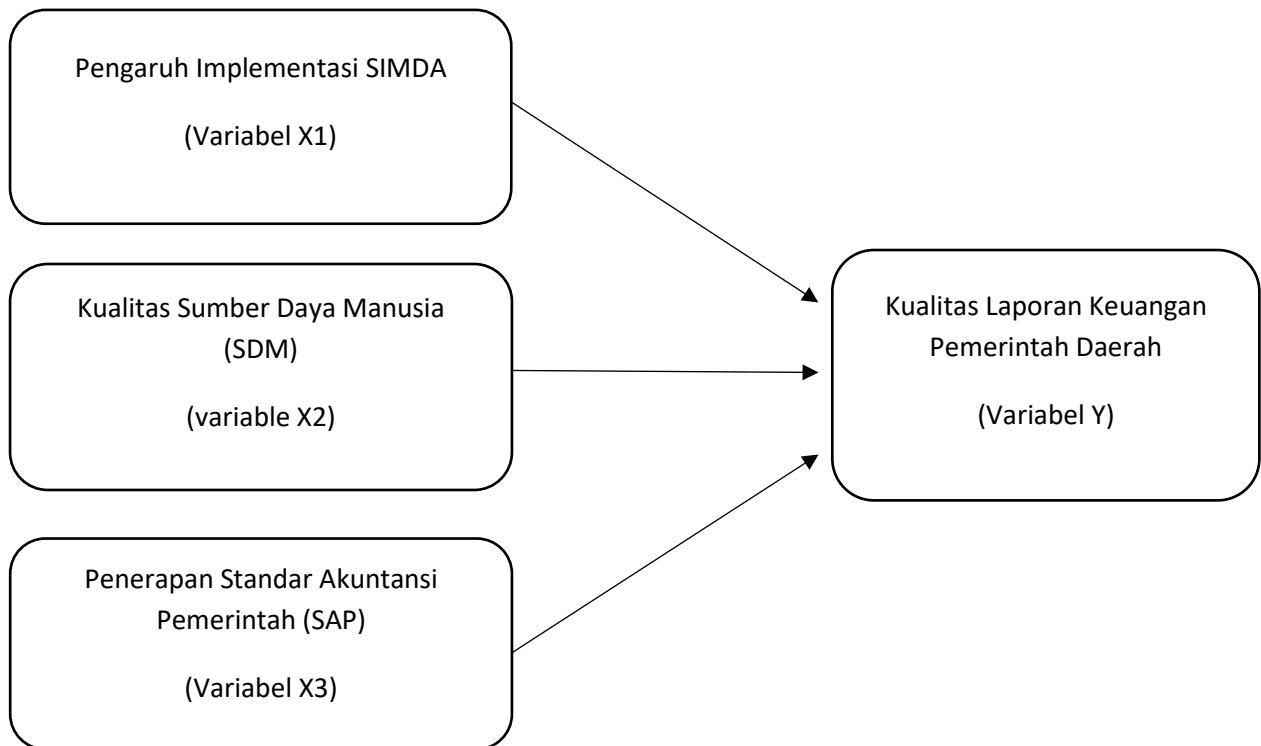
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H₁ : Implementasi SIMDA, kualitas SDM dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kabupaten Malang.
- H₂ : Implementasi SIMDA berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kabupaten Malang.
- H₃ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kabupaten Malang.
- H₄ : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak ada perantara.

Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) menyatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sanusi (2014:87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kumpulan. Kumpulan elemen tersebut menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari dari kumpulan itu. Dalam praktiknya, seorang

peneliti jarang sekali melakukan penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen (populasi). Elemen merupakan subjek dimana pengukuran itu dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan katakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2014:120). Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang memiliki kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dari penelitian ini yaitu Staf yang telah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan aplikasi SIMDA dan Staf bagian keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	72	2	4	3,25	0,680
Kualitas Sumber Daya Manusia	72	1	4	3,49	0,566
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah	72	1	4	3,26	0,637
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72	2	4	3,25	0,672
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) (X1) memiliki jawaban minimum 2 dan jawaban maksimum 4, dengan rata-rata sebesar 3,25 serta standart deviasi sebesar 0,680. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) memiliki jawaban minimum 1 dan jawaban maksimum 4, dengan rata-rata sebesar 3,49 serta standart deviasi sebesar 0,566. Variabel Penerapan Standard Akuntansi pemerintah (X3) memiliki jawaban minimum 1 dan jawaban maksimum 4, dengan rata-rata sebesar 3,26 serta standart deviasi sebesar 0,637. Variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki jawaban minimum 2 dan jawaban maksimum 4, dengan rata-rata sebesar 3,25 serta standart deviasi sebesar 0,672.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Standard Nilai	Keterangan
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)	0,836	0,60	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	0,712	0,60	Reliabel
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3)	0,907	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y))	0,894	0,60	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel adalah $> 0,60$ dengan demikian hasil penelitian reliabel.

Uji Normalitas

Uji ini untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$ maka asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Kualitas Sumber Daya Manusia	Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
N		72	72	72	72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25,99	27,89	84,76	25,99
	Std. Deviation	3,637	2,576	8,893	3,963
Most Extreme Differences	Absolute	,096	,125	,077	,110
	Positive	,096	,116	,076	,096
	Negative	-,085	-,125	-,077	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z		,812	1,063	,656	,932
Asymp. Sig. (2-tailed)		,525	,209	,782	,350

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah 2021

Dari Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh bahwa nilai pada variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) sebesar $0,525 > 0,05$, variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) sebesar $0,209 > 0,05$, variabel penerapan standard akuntansi pemerintahan (X3) sebesar $0,782 > 0,05$ dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar $0,350 > 0,05$ maka sesuai dasar pengambilan kesimpulan bahwa asumsi normalitas terpenuhi pada variabel.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factor* (VIF). cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah apabila nilai tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 maka dapat di indikasikan adanya multikolinieritas. Menurut Priyono (2015:63), jika nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 maka dapat diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinieritas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

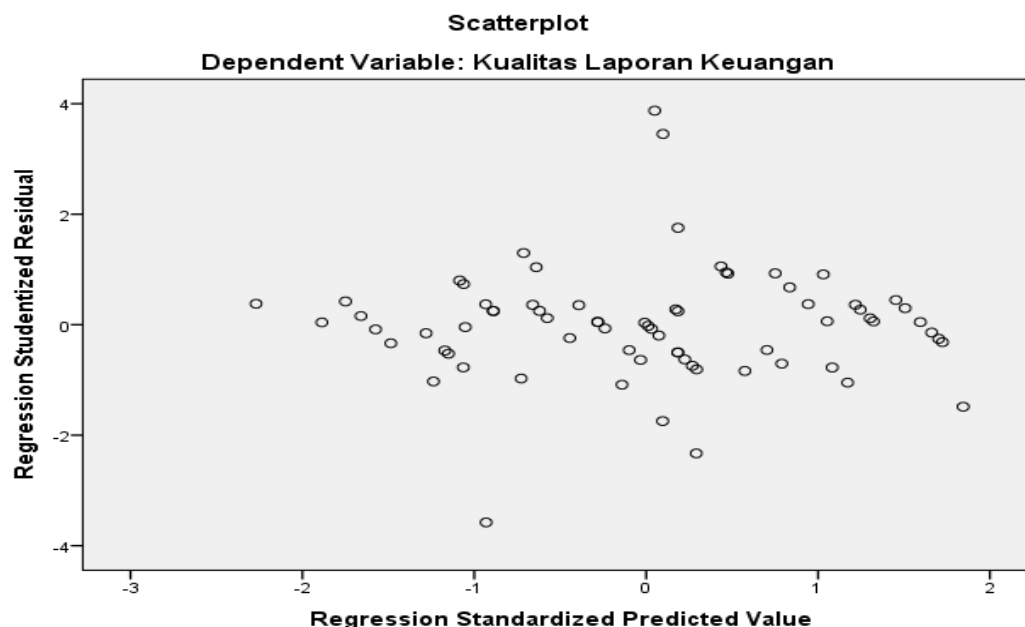
Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-3,311	2,119		-1,562	,123		
1 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	,690	,079	,633	8,775	,000	,320	3,124
Kualitas Sumber Daya Manusia	-,082	,065	-,054	-1,271	,208	,937	1,068
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah	,161	,032	,362	5,004	,000	,318	3,141

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan nilai VIF maka Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) $3,124 < 10,00$, Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) $1,068 < 10,00$, dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (X3) $3,141 < 10,00$ dan nilai tolerance Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) $0,320 > 1,00$, Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) $0,937 > 1,00$, dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (X3) $0,318 > 1,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisita

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil grafik *scatterplot* pada gambar 4.8 diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak (tidak berpola) serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Analisis Linear Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis, yang mana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Adapun rumus persamaan linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,311	2,119		-1,562	,123
1 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	,690	,079	,633	8,775	,000
Kualitas Sumber Daya Manusia	-,082	,065	-,054	-1,271	,208
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah	,161	,032	,362	5,004	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$$Y = -3,331 + 0,690x_1 - 0,082x_2 + 0,161x_3 + e$$

Berdasarkan model regresi tersebut, maka hasil regresi berganda dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Konstanta (α), nilai $\alpha = -3,311$ menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -3,311.
- Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki nilai 0,690 artinya setiap terjadi peningkatan pada Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya setiap terjadi penurunan pada Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai -0,082 artinya setiap terjadi peningkatan pada Kualitas Sumber Daya Manusia akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya setiap terjadi penurunan pada Kualitas Sumber Daya Manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai 0,161 artinya setiap terjadi peningkatan pada Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya setiap terjadi penurunan pada Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	988,702	3	329,567	177,462	,000 ^b
Residual	126,284	68	1,857		
Total	1114,986	71			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) berpengaruh secara simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Y).

1. Uji Koefisien Determinan

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,942 ^a	,887	,882	1,363

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Manajemen Daerah SIMDA

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R Square sebesar 0,887 atau 88,7% hal ini menunjukkan bahwa presentase dari variabel Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 88,7% sedangkan 11,3% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercantumkan dalam penelitian ini.

2. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji t merupakan pengujian regresi yang bertujuan untuk mengetahui signifikasi secara parsial , yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,311	2,119		-1,562	,123
1 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	,690	,079	,633	8,775	,000
Kualitas Sumber Daya Manusia	-,082	,065	-,054	-1,271	,208
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah	,161	,032	,362	5,004	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa :

a. Nilai Sig. Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga variabel Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Jika Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat. Karena untuk mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat BPKP (Badan Pengawas dan Pembangunan) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengelola data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat di manfaatkan setiap saat yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dimana sebuah sistem yang berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

b. Nilai Sig. Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) sebesar $0,208 > 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal tersebut di karenakan kurangnya kompeten dari sumber daya manusianya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan disiplin ilmu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pone (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

c. Nilai Sig. Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga variabel Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan yang baik akan memberikan kualitas laporan keuangan yang baik. Karena dengan

menerapkan Standard Akuntansi Pemerintahan maka sama dengan mengikuti aturan Standard Akuntansi yang telah berlaku dan Penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai pedoman sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) berpengaruh secara simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
2. Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
4. Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)..
2. Penelitian ini terbatas hanya mengambil responden pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
3. Penelitian ini terbatas karena penelitian ini dilakukan pada masa pandemi, karena terdapat peraturan yang tidak memperbolehkan penelitian bertatap muka maka untuk membatasi penyebaran virus covid-19. Maka dari itu peneliti tidak bisa menjamin para responden tersebut sesuai dengan kriteria penelitian yang telah di tentukan.

Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini antara lain, adalah:

1. Disarankan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti, internal audit, organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini terbatas karena kecilnya populasi diharapkan peneliti selanjutnya menambah jumlah sampel dari penelitian. Seperti, Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu).

Daftar Pustaka

- Abidin, M. K., Affifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Implementasi SIMDA, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *kualitas laporan keuangan*, 138-139.
- Dr.Darmawan, M. (2020). *Dasar Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UNY press.
- Gunadi, g. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *laporan keuangan daerah*, 6-10.
- Lisda, R., Nurwulan, L. L., & Septianisa, L. (2018). Pengaruh Implementasi SIMDA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas laporan Keuangan. *Simda Dan Pengendalian Internal*, 572-573.
- Nagara, d. s., & mulyani, s. (2019). kualitas laporan keuangan daerah diukur menggunakan parameter nice. *kualitas laporan keuangan*, 143-145.
- Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas laporan Keuangan SKPD (Studi kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *kualitas laporan keuangan* , 12-13.
- Pone, S. M. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Lporan Keuangan Organisasi Sektor Publik. *Kualitas laporan keuangan*, 21-27.
- Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi DIY. *Laporan Keuangan Daerah*, 4-8.
- Pone , S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Universitas Sanata Dharma*.
- Sani, A., & Maharani, V. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Kuesioner dan Analisis Data)*. Malang: UIN MALIKI Press, Cetakan Ke 2.

*) **Listiya Ayuningsih** adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **M. Cholid Mawardi adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Arista Fauzi Kartika Sari** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang